



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 900/171/2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KUDUS NOMOR 900/509/2022 TENTANG PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA PERANGKAT DAERAH/SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN KUDUS

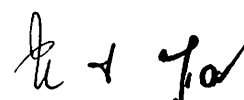
BUPATI KUDUS

- Membaca : 1. Surat Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 13 Juli 2022 Nomor 990/0874/0701/2022 perihal Usulan Perubahan Bendahara;
2. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tanggal 18 Juli 2022 Nomor 910/989/27.01/2022 perihal Permohonan Pergantian Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Tahun 2022;
3. Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja tanggal 20 Juli 2022 Nomor 900/440/24.01/VII/2022 perihal Usulan Perubahan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun 2022;
4. Surat Kepala Dinas Pertanian dan Pangan tanggal 26 Juli 2022 Nomor 910/945/22.01 perihal Permohonan Usulan Perubahan Nama Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Perikanan;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus yang optimal, tertib, dan lancar, telah ditetapkan Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/509/2021 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kudus, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/140/2022 tentang Perubahan Kedua atas Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/509/2021 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kudus;

Handwritten signature and initials

- b. bahwa dengan adanya beberapa usulan perubahan bendahara sebagaimana tercantum dalam Surat Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 13 Juli 2022 Nomor 990/0874/0701/2022, Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tanggal 18 Juli 2022 Nomor 910/989/27.01/2022, Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja tanggal 20 Juli 2022 Nomor 900/440/24.01/VII/2022 dan Surat Kepala Dinas Pertanian dan Pangan tanggal 26 Juli 2022 Nomor 910/945/22.01, maka perlu menetapkan Perubahan Ketiga atas Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/509/2021 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kudus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kudus tentang Perubahan Ketiga atas Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/509/2021 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kudus;

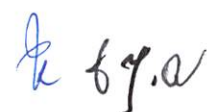
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);



16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 252);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 249);



Memperhatikan : Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/509/2021 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kudus, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/140/2022 tentang Perubahan Kedua atas Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/509/2021 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kudus;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Perubahan Ketiga atas Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/509/2020 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Perangkat Daerah/ Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kudus, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/140/2022 tentang Perubahan Kedua atas Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/509/2021 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Perangkat Daerah/ Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kudus, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
Pada tanggal 5 Agustus 2022

BUPATI KUDUS,

HARTOPO

Tembusan :
Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
Tanggal : 5 Agustus 2022
Nomor : 900/171/2022

KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN,
BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PADA PERANGKAT DAERAH/ SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN KUDUS

NO	PERANGKAT DAERAH/ SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SEKRETARIAT DPRD.				CAHYANING PERTIWI, SE 19840607 200903 2006 Penata Tk.I (III/d)		
2.	SEKRETARIAT DAERAH				WIWIK WIJAYANTI, SE 19700803 199303 2 005 Penata Tk I (III/d)		
	a. Bagian Pemerintahan	KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN				ARMI YULISTYANI,S.Sos 19800707 200501 2 014 Penata Tk I (III/d)	
	b. Bagian Hukum	KEPALA BAGIAN HUKUM				SAPTU HARINI 19660924 198607 2 001 Penata Muda Tk I (III/b)	
	r. Bagian Kesejahteraan Rakyat	KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				RIZAL YULIAN RULLIANSYAH, SE 19860711 201001 1 001 Penata Muda (III/a)	
	d. Bagian Perekonomian	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN				PRASETYANI KUSHERMAWATI,A.Md 19730118 200901 2 001 Penata Muda (III/a)	
	c. Bagian Administrasi Pembangunan	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN				SETYOWATI,SE 19781220 199903 2 003 Penata (III/c)	
	f. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA				ANGELA AYU DESMARIA, ST 19931226 202012 2 005 Penata Muda (III/a)	
	g. Bagian Organisasi	KEPALA BAGIAN ORGANISASI				TRI SARTUWI 19650417 198603 2 026 Penata Muda Tk. I (III/b)	
	h. Bagian Protokol dan komunikasi Pimpinan	KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN				SITI NURYASIH,SE 19820113 2000604 2 014 Penata (III/c)	
	i. Bagian Umum	KEPALA BAGIAN UMUM				EMY OKSIYANTI 19721004 199203 2 007 Penata Muda Tk.I (III/b)	
3.	INSPEKTORAT				MOCH. SLAMET 19740831 200901 1 006 Pengatur (II/c)		

NO	PERANGKAT DAERAH/ SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	BENDAHARA PENGLUARAN	BENDAHARA PENGLUARAN PEMBANTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH				SHAFIRA FACHRUN NISA,SE 19950125 202012 2 007 Penata Muda (III/a)		
5.	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				NURUL AISYIYAH SAFITRI, SE 19830605 200604 2 010 Penata (III/c)		
6.	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH SELAKU SKPD		LEO AGUS WIBOWO , A.Md 19790818 200502 1 003 Penata (III/c)		IDA SISWANTI 19710210 200604 2 013 Penata Muda Tk I (III/b)		
7.	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA		DEDDY ANDRIYANTO 19761217 200604 1 005 Pengatur Tk I (II/d)		IMAM SUKACA, A.Md 19750801 201001 1 007 Penata Muda (III/a)		
		KEPALA BIDANG PENDIDIKAN DASAR				EDY SETYO NUGROHO 19821118 201406 1 005 Pengatur Muda Tk I (II/b)	
		KEPALA BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT				SITI KHODIJATUL ULYA 19770104 201001 2 002 Pengatur (II/c)	
		KEPALA BIDANG KEPEMUDAAN				INDUN MASRUNI 197810022 201406 2 003 Pengatur Muda Tk I (II/b)	
		KEPALA BIDANG OLARHAGA				RETNO DWI RAHAYU, S.IP 19671007 200604 2 005 Penata Muda (III/a)	
8.	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		KHORISWANTO 19810722 200801 1 004 Pengatur (II/c)		MERRY WIDYAMURTI, S.S 19811215 200501 2 005 Penata Tk I (III/d)		
9.	DINAS KESEHATAN				SRI SUHARTI 19730211 200801 2 006 Pengatur Tingkat I (II/d)		
		KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT				NOOR ARIFAH,SST.Keb 19690628 199103 2 007 Penata Tk I (III/d)	
		KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT				NUNUNG DWI NURANIFAH,SKM 19791128 201101 2 004 Penata (III/c)	
		KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN				ESTI LESTYANINGSIH 19660805 198903 2 011 Penata Tk I (III/d)	
		KEPALA UPTD LABORATORIUM KESEHATAN		ASIH WIDYA HASTUTI, A.Md.AK 19820115 201101 2 013 Penata Muda Tk I (III/b)		MARIA DEVI NATALINA, AMd.Ak 19841223 200903 2 008 Penata Muda Tk I (III/b)	

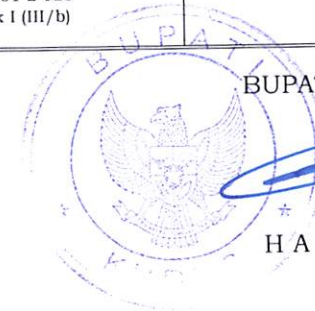
NO	PERANGKAT DAERAH/ SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		KEPALA UPT PUSKESMAS WERGU WETAN				ENY WIDIASTUTI,SKM 19771111 200501 2 014 Penata Tk I (III/d)	
		KEPALA UPT PUSKESMAS PURWOSARI				ELISTA KUSUMA ARIEF, A.Md.Keb. 19770803 200701 2 009 Penata Muda (III/a)	
		KEPALA UPT PUSKESMAS RENDENG				ISWATI, S.Kep 19801128 200801 2 007 Penata Muda Tk. I (III/b)	
		KEPALA UPT PUSKESMAS JATI				ABDUL CHAKIM, Amd Farm 19880912 200903 1 001 Pengatur Tk. I (II/d)	
		KEPALA UPT PUSKESMAS NGEMBAL KULON				DEWI FATMAWATI, Amd. Keb 19880415 201704 2 004 Pengatur Tk I (II/d)	
		KEPALA UPT PUSKESMAS UNDAAN				FITRI PRAMUSINTO, Amk 19810728 200903 1 004 Penata Muda Tk I (III/b)	
		KEPALA UPT PUSKESMAS NGEMPLAK				DINA FITRIYANA, A.Md Keb 19780905 200701 2 008 Penata Muda (III/a)	
		KEPALA UPT PUSKESMAS MEJOBO				IIN SAFITRI,Amd Keb 19871027 201001 2 002 Penata Muda Tk I (III/b)	
		KEPALA UPT PUSKESMAS JEPANG				RIZKI MUNDIARTANTI, Amd Keb 19870604 201101 2 022 Penata Muda Tk I (III/b)	
		KEPALA UPT PUSKESMAS JEKULO				RETNOWATI MULYANINGTYAS,SST Keb 19740409 200604 2 015 Penata Muda Tk I (III/b)	
		KEPALA UPT PUSKESMAS TANJUNGREJO				SRI HADI SETTYANINGSIH,Amd. Keb 19761230 200701 2 014 Penata Muda (III/a)	
		KEPALA UPT PUSKESMAS DAWE				RINDHO'AH, S.ST Keb 19800616 200501 2 016 Penata Muda Tk. I (III/b)	
		KEPALA UPT PUSKESMAS REJOSARI				IDA YENI LESTARI, A.Md. Rad 19770226 200903 2 001 Pcnata Muda Tk I (III/b)	
		KEPALA UPT PUSKESMAS BAE				IRA MEIRISA, SKM 19770527 200003 2 002 Penata (III/c)	
		KEPALA UPT PUSKESMAS GRIBIG				NURUL SUKMAWATI, SSt. Keb 19760616 200604 2 015 Penata Muda Tk I (III/b)	

NO	PERANGKAT DAERAH/ SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
10.	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	KEPALA UPT PUSKESMAS GONDOSARI				DINI WULANDARI,SST.Keb 19850308 200902 2 003 Penata Muda Tk I (III/b)	
11.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	KEPALA UPT PUSKESMAS KALIWUNGU				SULISTYOWATI,S.ST.Keb 19770407 200501 2 008 Penata (III/c)	
12.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	KEPALA UPT PUSKESMAS SIDOREKSO				NURUL LAILY HIDAYAH, Amd Keb 19861013 201001 2 022 Penata Muda Tk I (III/b)	
13.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KEPALA UPT PUSKESMAS DERSALAM				DIYAN HERU ATMOJO, SKM 19811109 200903 1 004 Penata Tk I (III/d)	
14.	DINAS TENAGA KERJA,PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		SUTIYATUN 19661217 198603 2 005 Penata Muda Tk.I (III/b)		SRI HARTATIK,S.Psi 19791221 201001 2 016 Penata Tk I (III/d)		
15.	DINAS PERDAGANGAN		WINARTI 19720917 200801 2 007 Pengatur Tk I (II/d)		TRIAS APRILIANA, S.I.P 19780401 200801 2 014 Penata Muda (III/a)		
16.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		ABDUL WAHAB 19801229 200604 1 009 Pengatur Tk I (II/d)		USWATUL KHASANAH, SE 19780511 201406 2 002 Penata Muda Tk I (III/b)		
17.	DINAS PERHUBUNGAN	KEPALA BIDANG KOMUNIKASI	ITA HASTARITA AGUSTIN 19810817 201001 2 004 Pengatur (II/c)		HAPSARI SAPTA RINI, S.IP 19790603 201001 2 001 Penata Muda (III/a)		
18.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	KEPALA BIDANG BINA MARGA	SULISTYONO, SE 19750707 200801 1 1009 Penata Muda (III/a)		SUDARWIYATI 19690626 199203 2 007 Penata Muda Tk. I (III/b)		
			AGUS YANUARTO 19740101 200901 1 016 Pengatur Tk I (II/d)		EKO DWI PUJIASTUTI 19720304200701 2 013 Pengatur Tingkat I (II/d)		
					KURNIYAWATI PUJI RAHAYU, A. Md 19761013 201001 2 013 Penata Muda (III/a)		
						TATUK BAYU SURYANINGTYAS, A.Md 19810625 201101 1004 Pengatur Tk I (II/d)	
						SUHARTATIK 19730301 199203 2 006 Penata Muda Tk. I (III/b)	

NO	PERANGKAT DAERAH/ SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
19.	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP	KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR KEPALA BIDANG TATA BANGUNAN DAN DRAINASE KEPALA BIDANG PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KEPALA BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KEPALA BIDANG PENGENDALIAN DAN PEMULIHAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KEPALA BIDANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP KEPALA BIDANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DAN RUANG TERBUKA HIJAU	SRI INDAH KURNIATI, S.IP 19720816 200604 2 011 Penata Muda Tk I (III/b)	RONA FERI GESTANO, ST 19861213 201903 1 006 Penata Muda (III/a)	SITI ROHMATUN, SE 19861229 201001 2 029 Penata Muda Tingkat I (III/b)	UUT TRI HAFSARI 19790503 200801 2 012 Pengatur Tk I (II/d) BUDI SANTOSO 19710408 200801 1 003 Pengatur (II/c) MARIA LISTIANA NOOR,Amd 19760501 201001 2 002 Penata Muda (III/a) DADAN DERI GUSMAWAN, ST 19920830 201903 1 012 Penata Muda (III/a) SITI ROCHANA, ST 19821103 200604 2 027 Penata Muda Tk I (III/b) HERY SETYANTO, ST 19861213 201903 1 006 Penata Muda (III/a) EKALISTIE WAHYU PRAPTIWI, ST 19831013 201101 2 007 Penata Muda Tk I (III/b)	
20.	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	KEPALA BIDANG KETAHANAN PANGAN KEPALA BIDANG PERIKANAN KEPALA BIDANG PETERNAKAN KEPALA BIDANG TANAMAN PANGAN DAN PERKEBUNAN	SRI FATMAWATI 19790430 200001 2 013 Pengatur (II/c)	SUCIATI 19720214 200701 2 015 Pengatur Tk I (II/d)	INDRI ISTRIYANI, SE 19850323 201001 2 041 Penata (III/c)	YULIATI RAHAYU 19831021 201001 2 009 Pengatur (II/c) YUSUF SUNARMAN 19670110 200701 1 030 Penata Muda (III/a) BUDI MULYONO 19740516 201001 1 001 Pengatur (II/c) NOOR AFRIANI 19800401 201001 2 014 Penata Muda (III/a)	
21.	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN				ANI RISTIYANI,SE 19740706 201001 2 004 Penata Muda (III/a)		
22.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		ABIDIN SANTOSO 19740720 200901 1 005 Pengatur Tk I (II/d)		ALFA YUANA,S.Mn 19790325 199803 2 001 Penata (III/C)		

NO	PERANGKAT DAERAH/ SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
23.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT	EDY WIDIANTARA 19680119 198811 1 001 Penata Muda Tk I (III/b)			MASDUKI 19770218 200901 1 007 Pengatur (II/c)	
		KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERDA				RUDY KURNIAWAN, SE 19680912 200701 1 017 Penata Muda (III/a)	
		KEPALA BIDANG LINMAS DAN DAMKAR				EVI HERMIATI 19770807 200901 2 005 Pengatur Tk I (II/d)	
24	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			PUJI RAHAYU KARYATI 19770314 201001 2 002 Pengatur Tk I (II/d)	ABDUL JALIL 19841017 201406 1 001 Pengatur Muda Tk I (II/b)	
25	KECAMATAN KOTA				SRI WIJAYATI, SE 19750819 199702 2 001 Penata (III/c)		
					KUSMIYATI, S.AP 19671123 199103 2 001 Penata (III/c)		
		LURAH PURWOSARI				UMI HIDAYATI 19670206 198607 2 004 Penata Muda Tk. I (III/b)	
		LURAH SUNGGINGAN				NUHAN 19811231 201001 1 031 Pengatur Muda (II/a)	
		LURAH PANJUNAN				AGUS SULISTIYONO 19800605 201001 1 006 Pengatur (II/c)	
		LURAH WERGU KULON				SUPAMI 19820208 200801 2 012 Pengatur Muda Tk. I (II/b)	
		LURAH WERGU WETAN				NOVA TRI WAHYUNI 19751102 201001 2 002 Pengatur (II/c)	
		LURAH MLATI KIDUL				SHOLIKHATUN 19790720 200901 2 008 Pengatur Muda (II/a)	
		LURAH MLATINOROWITO				SUKANAH 19681123 199603 2 002 Penata Muda Tk I (III/b)	
		LURAH KERJASAN				MUHAMMAD URIP 19720106 200604 1 011 Pengatur Muda Tk I (II/b)	
		LURAH KAJEKSAN				EDY NURSANTO 19690504 200901 1 005 Pengatur Tk I (II/d)	

NO	PERANGKAT DAERAH/ SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	BENDAHARA PENGLUARAN	BENDAHARA PENGLUARAN PEMBANTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
26	KECAMATAN JATI		UMMI HANDASAH 19790227 201001 2 002 Pengatur (II/c)		MUHAMAD ISA ANSHORI, S.AP 19680415 200906 1 001 Penata Muda (III/a)		
27	KECAMATAN UNDAAN		ZULIATI 19720714 200604 2 014 Pengatur Tk I (II/d)		SUGENG HARJONO 19690919 200604 1 004 Pengatur Tk I (II/d)		
28	KECAMATAN MEJOBLO		KHOIRONI ASYHAR 19840810 201001 1 002 Pengatur (II/c)		SOLIKHAH 19710823 200701 2 007 Pengatur Tk. I (II/d)		
29	KECAMATAN JEKULO		DJAMA'AH,S.I.P 19690620 200701 2 025 Penata Muda (III/a)		MUHAMAD ULIL ABSOR 19790718 201001 1 005 Pengatur (II/c)		
30	KECAMATAN KALIWUNGU		MUNDAKIR 19641211 200701 1 008 Pengatur Tk I (II/d)		MOCHAMAD 19740427 200701 1 013 Pengatur (II/c)		
31	KECAMATAN DAWE		SULISTYANINGSIH,SIP 19680509 200701 2 009 Penata Muda (III/a)		SUGIARTO 19810604 200801 1 005 Penata Muda Tk I (II/d)		
32	KECAMATAN GEBOG		SUGITO 19681212 200901 1 009 Pengatur (II/c)		MUHAMMAD HIDAYAT 19840708 201406 1 002 Pengatur Muda (II/a)		
33	KECAMATAN BAE		NOVA DAMAYANTI,SIP 19740623 200604 2 010 Penata Muda (III/a)		IRAWATI,SE 19790909 200801 2 020 Penata Muda Tk I (III/b)		



BUPATI KUDUS,

HARTOPO

Handwritten signature/initials in blue ink.